



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI KE PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 06 DESEMBER 2023**

=====

Kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu Komisi II DPR RI juga akan meninjau sejauhmana program prioritas pertanahan yang telah menjadi agenda pemerintah yang harus dipantau agar sesuai dengan harapan pemerintah dan DPR RI.

I. Pengantar

Sambutan Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin

Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan Komisi II DPR RI dan anggota Komisi II DPR RI karena memberikan perhatian ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024. Dengan adanya pertemuan ini maka persiapan dalam pemilu da pilkada 2024 akan lebih mendalam dibicarakan berbagai pihak sehingga persiapan pesta demokrasi tersebut dapat lebih baik. Dan dengan bantuan anggota Komisi II kami berharap persiapan pemilu dan pilkada dapat berlangsung sukses.

Secara umum ada beberapa permasalahan namun hal tersebut telah ditangani oleh disdukcapil dengan KPU. misalnya adanya perbedaan jumlah KTP dengan DPT. Kami berharap nanti pada masa mendekati pemilu hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Demikian juga progres NPHD, Sebagian besar sudah di tandatangani, hanya tinggal 4 daerah kab/kota yang belum.

Kami akan mencegah dan menolak politik uang dalam pemilu karena hal tersebut akan merusak kualitas pemilu. Secara umum Indeks kerawanan di Sumatera Utara dalam kateroti sedang. Kami memiliki telah melakukan prediksi perencanaan mitigasi bila terjadi permasalahan dalam pemilu. Namun demikian kami tetap waspada untuk melihat pola pengaruh dari tempat lain. Yang penting untuk kesatuan bangsa tetap terjaga.

Pengantar dari Ketua Tim Kunres

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan DPT terbesar ke 4 di Indonesia. Oleh karena itu, kunjungan kerja ke Medan untuk melihat persiapan dalam pemilu pertama tahapan dan persiapan-persiapan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Hal ini kami lakukan karena pemilu tanggal 14 Feb 2023 tinggal 2 bulan lagi.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses dalam masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kota Medan maupun Bawaslu KPU Kota Medan, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Adapun, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih terkait DPTb, DPK serta sejauhmana distribusi logistik pemilu.

Kunjungan ini perlu dilakukan Komisi II DPR RI karena kami sedang memantau persiapan pemilu. Karena ada kondisi saat ini memaksa kami untuk selalu memantau persiapan agar semua berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan KPU dan Komisi II DPR sejak 2 tahun yang lalu. Agar tahapan tidak terganggu maka kami selalu melakukan kegiatan untuk memantau tahapan persiapan pemilu sehingga kita mendapatkan pemilu yang damai. Dengan proses tersebut sehingga menghasilkan wakil rakyat yang punya kontribusi ke rakyat.

Terkait dengan maka penandatanganan NPHD harus lancar dan tidak terganggu. Sehingga sedang dipikirkan oleh kami bagaimana agar penandatanganan NPHD lebih mudah prosesnya. Harapan kami, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Sumatera Utara dapat melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-wakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun tim Kunspek antara lain :

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1	A - 270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, SSI,MT	Ketua Tim/F-P Golkar
2	A - 142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H.	Wakil Ketua Komisi II / F-PDI.P
3	A - 240	Paryono, SH, MH	Anggota/ F-PDI.P
.4	A - 525	Ir. Ongku P Hasibuan, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
5	A - 417	Drs. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS

II. Hasil Kunjungan

Persiapan Pemilu Serentak 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pj Gubernur Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Persiapan & Kesiapan Pelaksanaan PEMILU Tahun 2024 & Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pertanian

Rabu, 6 Desember 2023



HASSANUDIN
PJ GUBERNUR SUMATERA UTARA

Kantor Gubernur Sumatera Utara

SUMATERA UTARA

- Luas Wilayah**
72.981,25 KM PERSEGI
- Area**
25 KABUPATEN DAN 9 KOTA, 432 KECAMATAN, 5.417 DESA DAN 693 KELURAHAN
- Jumlah Penduduk**
SUDAH DIKATAHKAN 13.800.000 PENDUDIK
Jumlah Laki-laki 7.709.206 jiwa dan perempuan 7.090.794 jiwa
- Agama**
ISLAM, KRISTEN PROTESAN, KATOLIK, BUDAHA, HINDU

MELAYU, BATAK KARO, SIMALUNGUN, PAKPAK, BATAK TOSA, MANDAILING, PESIRIR DAN NIAS, DITAMBAH ETNIS LAINNYA SEPERTI JAWA, PADANG, SUNDA, BUGIS, TONGKONG

KONDISI HIBAH PENDANAAN PILKADA 2024 SUMATERA UTARA

30 DAERAH SUDAH MENADANTANGANI NPHD
1 PROVINSI & 30 KABUPATEN/KOTA

4 DAERAH YANG BELUM MENADANTANGANI NPHD

- BADANG LAWAS UTARA**
Masih Tahap pembahasan Antara Pemda & KPU Bawastu
- NIAS SELATAN**
Kebutuhan Anggaran Rp 10 M Sementara Anggaran yang Ditanggung Rp 2 M Pada Tahun 2024
- NIAS UTARA**
KPU Mempakan Rp 3M, Anggaran Tersedia Rp 1M
- CUNING STOOL**
Masih Pembahasan Antara Pemda dengan KPU dan Bawastu, Belum ada kesepakatan

UPAYA PERCEPATAN PENADANTANGAN NPHD PILKADA TAHUN 2024

Komunikasi & Koordinasi Pemda & Penyelenggara Pemilu Komitmen Menyukseskan Pilkada 2024

Mencari Solusi (Win-win Solution) dan Menghilangkan Ego Sektoral

PERSOALAN PERTANAHAN DI SUMATERA UTARA

1. LAHAN EKS HGU PTPN II

Permasalahan Lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II berlangsung sejak tahun 2002 ketika hibah PTPN II mengajukan perpanjangan HGU

Pada saat itu lahan PTPN II banyak digarap dan dikuasai oleh masyarakat dengan berbagai alasan.

Gubernur pada saat itu membentuk Tim B Plus untuk mengidentifikasi lahan-lahan PTPN II yang nantinya tidak akan dimasukkan kedalam lahan HGU PTPN II kembali.

Hasil inventarisasi lahan seluas 5.873,06 Hektar dikeluarkan dari HGU PTPN II melalui SK BPN Nomor: SK BPN No. 42.45.KE Tahun 2002 serta SK BPN No. 30 Tahun 2004

TINDAK LANJUT

- Melalui keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/2002/ KPTS/2020 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 5.873,06 Ha.
- Kondisi Saat ini, Tim yang dibentuk telah melakukan verifikasi dan identifikasi untuk selanjutnya juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Daftar Nominalif untuk lahan seluas 892,5 Hektar dan akan terus bertambah pada tahun ini, sesuai dengan permintaan yang sudah diverifikasi

2. PERMASALAHAN LAHAN DI KELURAHAN SARI REJO KOTA MEDAN

TINDAK LANJUT

Permasalahan Lahan di Kelurahan Sari Rejo Kota Medan berkaitan dengan adanya penguasaan Tanah seluas 4.260 Ha oleh masyarakat, yang merupakan bagian daritanah seluas 591,3 Ha milik Departemen Pertahanan cq. TNI AU Laniid Medan yang terdistribusi dalam Inventaris Kekayaan Negara. No. Registrasi 50506001, yang digunakan sebagai wilayah teritorial pengamanan AURI, terletak di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

- Di atas tanah seluas 260 Ha tersebut terdapat perumahan penduduk sebanyak 5.425 KK/ 28.000 jiwa dengan pemukiman yang sudah padat termasuk juga terdapat berbagai fasilitas umum seperti masjid, gereja, sarana, bus, sekolah, jalan umum, lapangan umum dan lain-lain.
- Penertiban terhadap lahan tersebut terkendala oleh izin dari Kementerian Pertahanan RI dan skema penyelesaian yang akan lebih sulit mengingat lokasi lahan berada di tengah kota Medan dimana tanah memiliki harga yang sangat tinggi

3. PERMASALAHAN TANAH DI SIMALINGKAR SEI MENCIRIM

Tanggal 26 Juni 2020
Permasalahan Tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim ini kembali menjadi perhatian Masyarakat Lusa yang mana pada tanggal 26 Juni 2020 petani yang berasal dari Petani Simalingkar dan Sei Mencirim jalan kaki dari Medan ke Jakarta. Kemudian dilanjutkan pada Tanggal 24 Agustus 2020, melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden

TINDAK LANJUT

- Tanggal 31 Agustus 2020
Rapat Koordinasi Secara Virtual dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, MenteriATR/KPN, Gubernur dan Forkopimda Sumut serta PPTN-II, dengan kesimpulan pertemuan tuntutan masyarakat agar segera diselesaikan dengan segera.
- Tanggal 3 September 2020
Gubernur Membentuk Tim Khusus Penyelesaian Sengketa Tanah Antar PPTN-I dengan Warga Masyarakat Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim sesuai dengan SK Nomor : 188.44/397/KPTS/2020
- Tanggal 30 September 2020
KSP dengan surat Nomor: B-65/KSA/09/2020 menyampaikan daftar nama petani warga Simalingkar dan Sei Mencirim untuk diverifikasi




4. BUMI PERKEMAHAN SIBOLANGIT

Permasalahan Bumi Perkemahan sibolangit adalah terkait penguasaan masyarakat tanpa alas hak pada lahan milik Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara.

Lahan seluas 225 Hektar milik Pramuka saat ini banyak dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu secara tidak syah sehingga mengganggu aktivitas Pramuka di Sumatera Utara

Gubernur Sumatera Utara melalui surat kuasa dari Gerakan Pramuka kuartir daerah Sumatera Utara berupaya agar lahan tersebut dikembalikan ke fungsi semula dengan upaya merelokasi masyarakat dengan pola seminimal mungkin terjadi konflik




GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam berbagai upaya pelaksanaan Reforma Agraria diantaranya Melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Sumatera Utara, Gubernur dan seluruh OPD Provinsi terkait terlibat secara aktif di dalam tim tersebut serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk membantu kantor pertanahan setempat dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Dari tahun ke tahun, target kinerja dan capaian kinerja terus kita lingkarkan perolehannya.




TIM GTRA TAHUN 2023 DIBENTUK BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/330/KPTS/2023 TANGGAL 2 MEI 2023. TARGET REFORMA AGRARIA DIFOKUSKAN PADA PENATAAN ASSET PADA LAHAN DI SEKITAR DANAU TOBA, YANG DIAWALI DENGAN JOINT SUVEY LINTAS SEKTORAL

KESIMPULAN



PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU DISUMATERA UTARA SUDAH KAMI LAKSANAKAN DAN KAMI PASTIKAN SIAP UNTUK TERESELANGGARANYA PEMILU 2024 DENGAN DAMI DI SUMTAERA UTARA



TERKAIT PENYELESAIAN TANAH EKS HGU PT.II MASIH TERUS BERJALAN PROSES VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI UNTUK DIMAKELURAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) TENTANG DAFTAR NOMINATIF



PERMASALAHAN SARI REJO DAN SEI SIMALINGKAR DAN MENCIRIM, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENUNGGU PROSES DARI PEMRINTAH PUSAT



Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi

Untuk pengamanan Pemilu 2024 ini kami melakukan operasi Mantap Brata. Dalam hal itu kami melakukan Upaya pendekatan pencegahan agar nantinya Bawaslu dapat memberikan langkah konkret. Kami dalam posisi untuk selalu dalam posisi netral. Seperti dalam kasus siantar itu kami berusaha dalam posisi professional. Artinya peran polri dalam mengawal tahapan2 pemilu 2024 tetap dalam posisi sebagai penugasan kami 222 hari untuk operasi mantap brata. Dalam operasi tersebut, kami mengedepankan strategi, preemtif, yaitu strategi untuk mengatasi niat-2 buruk untuk dapat diminimilasi terutama menanggulangi perrsepsi public yg mengganggu pemilu seperti kasus toba yang dapat berkembang menjadi penghinaagn agama maka dengan bantuan keluarga besarnya yang bersangkutan kami tangkap. Selanjutnya kami akan memantau sejauhmana, penyelenggaran pemilu yang krusial, seperti logistic dalam posisi aman terkendali. Demikian juga untuk pencegahan, kita juga lakukan gakumdu bersama bawaslu adalah bagian dari konteks tugas.

KPU dan bawaslu dan tim pemenangan daerah dan caleg, kami minta dibuatkan pojok pemilu untuk mengambil langkah2 pencegahan. Dimana dialog di pojok pemilu untuk memecahkan persoalan yang muncul di lapangan

Pengamanan agar pemilu berjalan secara lancar, ada system IT sikadeka dari KPU, sehingga kami selalu mengontrol logistic pemilu dan dimana tps berada sehingga petugas kami dapat melihat sejauhmana posisi logistic pemilu sedang berlangsung. Dengan demikian kami bisa melihat titik lemah pergerakan logistic sehingga memantau kondisi tersebut. Besar harapan kami apabila semua tahapan dapat lancar dan netralitas TNI- Polri terjaga maka adalah keniscayaan bila partisipasi pemilu akan tinggi.

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHAPAN DAN TANTANGAN PEMILU 2024

AGUS ARIFIN
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara

Medan, 06 Desember 2023

sumut.kpu.go.id | KPU Provinsi Sumatera Utara | @kpuprovsumut

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2024

TOTAL PEMILIH
10.853.940

LAKI - LAKI: **5.360.844**
Perempuan: **5.493.096**

49,4% 50,6%

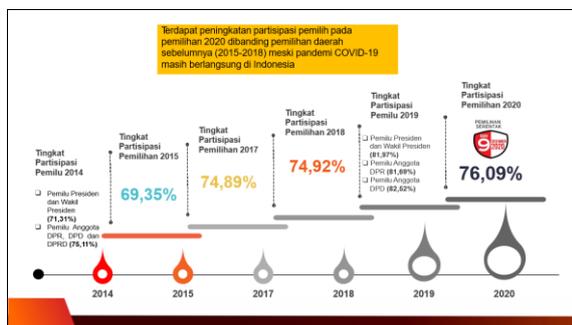
Tersebar di:
33 Kabupaten / Kota: 6.110 Desa / Kelurahan
455 Kecamatan: 45.875 TPS

SUMATERA UTARA TERDAPAT 162 DAPIL

1. PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN : 1 DAPIL
2. DPD : 1 DAPIL
3. DPR RI : 3 DAPIL
4. DPRD Prov : 12 DAPIL
5. DPRD Kab/Kota : 145 DAPIL

JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN INDEKS KEBUTUHAN LOGISTIK

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	INDEKS KEBUTUHAN LOGISTIK
1	KOTAK SUARA	230.285	5 Buah Per TPS + 2 Buah Per PPK untuk 33 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara
2	BILIK PEMUNGUTAN SUARA	183.500	4 Buah Per TPS
3	TINTA	91.750	2 Buah Per TPS
4	SEGEL	1.284.665	Untuk Kab/Kota : 33 per TPS
		50.880	Untuk PPK : 1 Per TPS + 11 Per PPK
		6.110	Untuk PPS : 1 Per PPS
		3.073.625	Untuk TPS : 67 per TPS
5	SEGEL PLASTIK	1.192.750	Total Kebutuhan Segel Provinsi Sumatera Utara



Tantangan Pemilu 2024

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Era Post Truth Kekuatan Teknologi Informasi yang rentan disalahgunakan para pihak (Berita Hoaks, Ujaran Kebencian, hasutan, dll)
- Tahapan Pemilu dan Pilkada bertumbuh: Intensitas Politik dan Beban Kerja Teknis Penyelenggara
- Pengawasan Kampanye Pemilu Di Media Sosial
- Distribusi Logistik Pemilu
- Netralitas ASN/In/Polri
- politik transaksional (Politik Uang), eksploitasi Politik Identitas dan Polarisasi Masyarakat

BAWASLU PROV. SUMUT



PEMILU SERENTAK 2024 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Disampaikan oleh
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Medan, 6 Desember 2023

BENTUK KOORDINASI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

- PEREMINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 - HIMBALAN TERKAIT PENYAGUNGAN DATA IDENTITAS DALAM SIPOL
 - PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS ASN
- KPU PROVINSI SUMATERA UTARA
 - Koordinasi, membangun komunikasi yang intens dan sinergis dalam pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi Sumatera Utara untuk membangun komitmen menjaga kualitas pemilu yang demokratis
- KEPOLISIAN DAERAH DAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
 - melakukan koordinasi dan membangun sinergis dalam forum gakkumdu untuk menyamakan persepsi dan pola dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tindak pidana pemilu
- PERGURUAN TINGGI, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
 - Peran pengawasan partisipatif dan saksi ahli
 - Pengawasan konten di media sosial
 - Keterbukaan informasi publik

HASIL PENGAWASAN DPT

1. Data Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024 sebanyak 60.393 orang
2. Data Pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum dalam DPT sebanyak 7.365 orang
3. Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik Atau jumlah pemilih potensial non KTP-Elektronik sebanyak 106.836 orang
4. Data Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri sebanyak 241 orang

STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE



The strategy is divided into two main branches: **PENCEGAHAN** (Prevention) and **PENGAWASAN** (Supervision).

PENCEGAHAN:

1. Melaksanakan Apel Siaga Pengawasan kampanye dan Deklarasi Daimi bersama seluruh Peserta Pemilu;
2. Melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye;
3. Melakukan Koordinasi dengan KPU, Kepolisian dan LD Peserta Pemilu;
4. Melakukan Pemetaan Karawanan Kampanye

PENGAWASAN:

1. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa untuk melakukan Pengawasan Melekat Terhadap Seluruh Kegiatan Kampanye;
2. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa untuk melakukan Pengawasan Terhadap Sikap Netralitas ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa serta Perangkat Desa
3. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa untuk melakukan Pengawasan Melekat Terhadap Kegiatan Kampanye di Media Sosial

KESIAPAN PENGAWASAN LOGISTIK

1. Pemetaan daerah rawan pendistribusian logistik, sebagai bentuk pencegahan terjadinya keterlambatan pendistribusian logistik dan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara;
2. Pembekalan kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk memastikan logistik yang sampai di TPS dalam kondisi Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Jenis, dan keadaan Baik;
3. Koordinasi dengan Stakeholder dalam hal pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik

ANGGARAN PILKADA SUMATERA UTARA

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyusunan perencanaan program sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/KI/10/2023
2. Penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 November 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 223.803.640.000,00.
3. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kesepakatan untuk penerimaan alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 78.331.274.000,00
4. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan proses Register Hibah ke Kanwil DJP/B Kementerian Keuangan.

KOORDINASI SENTRA GAKKUMDU



- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada bulan 27 Juli 2022 telah menyuarai keputusan Daerah oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melaksanakan pertemuan persyok dan jarkas untuk diorganisasikan dalam Sentra Gakkumdu.
- Pada tanggal 13 September 2022, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah merendahkan Surat Keputusan tentang penempatan personel Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Utara
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan berkolaborasi ke Polres dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2022 dimana Kasaband 1 Kamring Pidala Sumut selaku koordinator SG dari unsur kejaksaan.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan audiensi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bentuk koordinasi dalam menghadapi pemilihan umum serentak Tahun 2024
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan kejaksaan Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Raker Sentra Gakkumdu untuk menghadapi persiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang terdapat dalam Sentra Gakkumdu Provinsi telah mengakhiri Raker Koordinasi Resesori di Medan pada tanggal 19-22 September 2022, sehingga memenuhi seluruh aspek kerja persiapan tindak pidana pemilu.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kecamatan agar melakukan rapat koordinasi sentra gakkumdu di tingkat kabupaten dimasing masing daerah dalam rangka membangun sinergis dan menyamakan pemahaman dalam pola pengawasan penyelenggaraan tindak pidana pemilihan.
- Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Monitoring dan Supervisi ke SG Kabupaten/Kota

TERIMA KASIH

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu!



www.bawaslu.go.id | Bawaslu RI | @bawaslu_ri

CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu menyelenggarakan Pemilu serentak 2024 secara jujur dan adil. Sehingga dengan pemilu berkualitas maka Presiden-Wakil Presiden terpilih, para wakil rakyat terpilih akan sesuai hati nurani rakyat serta menghasilkan partisipasi pemilih yang tinggi.
2. Terkait dengan distribusi logistik pemilu, Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI-Polri untuk mengantisipasi penyebaran logistik di daerah yang secara geografis yang susah terjangkau.
3. Komisi II DPR RI, mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan animo masyarakat untuk

- mengikuti program PTSL dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga muncul kesadaran masyarakat terhadap administrasi pertanahan.
4. Komisi II DPR RI, meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan pemerintah daerah, guna menata kawasan Danau Toba sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 5. Terkait permasalahan pertanahan di Sumatera Utara, Komisi II DPR RI akan membahasnya pada rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN dalam masa persidangan berikutnya.

FOTO KEGIATAN



III. PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, KPU dan Bawaslu Sumatera Utara. Maka Komisi II DPR RI telah mendapatkan gambaran dan informasi serta data dalam persiapan Pemilu 2024. Persiapan tersebut berupa persiapan SDM, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu sudah sesuai harapan. Namun demikian, Komisi II DPR masih menemukan sejumlah kendala yang menjadi catatan agar bisa segera diantisipasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Oleh karena itu, seluruh data, informasi, ataupun masukan hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti oleh para Anggota Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.

**KOMISI II DPR RI
KETUA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK**

Dr. H Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI, MT